

KATA PENGANTAR




Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban BAPPEDA DIY sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA DIY dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2015 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Yogyakarta, Februari 2016

Kepala


Favin Agus Rayanto
NIP. 19641207 199103 1 004

IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj IP BAPPEDA DIY tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BAPPEDA DIY.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA BAPPEDA DIY 2012-2017 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA DIY yang telah ditetapkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA DIY Tahun 2015, menunjukan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori sangat tinggi. Semua sasaran strategis BAPPEDA DIY pada tahun 2015 pencapaiannya di atas 100%. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA DIY tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran strategis keterpaduan program/kegiatan meningkat dengan kategori sangat tinggi yang capaiannya $\geq 140,60\%$, adapun Realisasi kinerja sasaran adalah sebesar 8,28%, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 13,94% menunjukkan kesenjangan dapat diturunkan sebesar 5,66% dari

target menjadi 8,28%. Dari 157 indikator kinerja sasaran, sebanyak 13 sasaran kinerja tahunan yang belum mencapai target kinerja sasarnya;

Pencapaian Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dengan Rencana Yang Telah Disusun Sebelumnya dengan kategori sangat tinggi yang capainya sebesar 100,64%; adapun realisasi kinerja sasaran adalah sebesar 86,57% di atas target yang akan dicapai sebesar 84%. Capaian kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2015 sebesar 103,06% sedangkan terhadap target akhir RPJMD 2017 capaiannya sebesar 94,17%.

Pencapaian Sasaran Tersedianya data statistik yang akuntabel (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan dengan kategori sangat tinggi yang capainya 100,07%, Target ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan adalah sebesar 97%, sedangkan capainya adalah 97,07% atau sebesar 100,07% dari target. Jika dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD 2012-2017 (tahun 2017) maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 97,07% atau kurang 2,93% dari target yang diamanahkan pada akhir tahun RPJMD 2012-2017.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah DIY masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di DIY, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah DIY. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA DIY ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka

akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
I.2 TUGAS DAN FUNGSI	3
I.3 KEADAAN PEGAWAI	4
I.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan	4
I.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan	5
I.3.3 Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan	7
I.4 SARANA DAN PRASARANA	8
I.5 KEUANGAN	9
I.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	12
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	12
II.1.1 Visi dan Misi.....	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
II.1.3 Strategi	18
II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	19
II.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015	20
II.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY	20

II.3.2	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	21
II.4	INSTRUMEN PENDUKUNG.....	22
II.4.1	Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan)	22
II.4.2	Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)	23
II.4.3	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	23
II.4.4	Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)	24
II.4.5	Sistem Aplikasi Dataku	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
III.1	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015.....	26
III.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	27
III.2.1	Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatkan	28
III.2.2	Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dengan Rencana Yang Telah Disusun Sebelumnya	31
III.2.3	Tersedianya data statistik yang akuntabel (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan ...	33
III.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	38
III.4	TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA 2014.....	40
III.4.1	Evaluasi Kinerja 2014.....	40
III.4.2	Tindak Lanjut	40
BAB IV	PENUTUP	41
LAMPIRAN:	42
LAMPIRAN 1:	STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DIY :	43
LAMPIRAN 2:	PERENCANAAN STRATEGIS BAPPEDA DIY 2012-2017 :	44
LAMPIRAN 3 :	PENGHARGAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA TAHUN 2015 TINGKAT PROVINSI KATEGORI A :	49
LAMPIRAN 4 :	LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKIP TAHUN 2014 :	50
LAMPIRAN 5 :	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA :	53

LAMPIRAN 6 : PENGHARGAAN DALAM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015. PREDIKAT "A" (SANGAT BAIK) :	54
LAMPIRAN 7 : PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI PELAYANAN PUBLIK (APLIKASI PERENCANAAN) :	55
LAMPIRAN 8: PIAGAM PENGHARGAAN PENCAPAIAN MDG'S TERTINGGI :.....	56
LAMPIRAN 9 : PIAGAM PENGHARGAAN PENCAPAIAN MDG'S PENGENTASAN KEMISKINAN TERBAIK 2012-2014 :.....	57
LAMPIRAN 10: PERJANJIAN KINERJA :.....	58

DAFTAR TABEL

TABEL I-1. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM BAPPEDA DIY TAHUN 2015.....	5
TABEL I-2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	6
TABEL I-3. JUMLAH ASET BERDASARKAN JENIS PADA BAPPEDA DIY TAHUN 2015	8
TABEL I-4. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA DIY TAHUN 2015.....	9
TABEL II-1. PERUBAHAN SASARAN BAPPEDA DIY 2012-2017	13
TABEL II-2. TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI MISI	16
TABEL II-3. SASARAN KINERJA BAPPEDA DIY 2012-2017	17
TABEL II-4. KINERJA BAPPEDA DIY TAHUN 2015	20
TABEL II-5. TARGET BELANJA BAPPEDA DIY TAHUN 2015.....	21
TABEL II-6. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER-SASARAN STRATEGIS BAPPEDA DIY TAHUN 2015	21
TABEL III-1. SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	26
TABEL III-2. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA DIY TAHUN 2015.....	27
TABEL III-3. TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN KE-1 KETERPADUAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN MENINGKAT	29
TABEL III-4. TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN KE-2 KONSISTENSI ANTARA PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN SEBELUMNYA.....	32
TABEL III-5. TERSEDIAANYA DATA STATISTIK YANG AKUNTABEL (<i>UP TO DATE</i> , <i>VALID</i> DAN KEMUDAHAN AKSES UNTUK PUBLIK) UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN ...	34
TABEL III-6. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2015	39
TABEL III-7. TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2015	39

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. GRAFIK JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN	4
GAMBAR 2. GRAFIK KOMPOSISI PEGAWAI BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN	6
GAMBAR 3. GRAFIK KEBUTUHAN PEGAWAI BAPPEDA DIY	8
GAMBAR 4. PERSENTASE ANGGARAN BAPPEDA DIY TAHUN 2015	10
GAMBAR 5. WEBSITE JOGJA PLAN	22
GAMBAR 6. WEBSITE SISTEM INFORMASI PERENCANAAN RUANG	23
GAMBAR 7. WEBSITE MONEV	24
GAMBAR 8. WEBSITE META DATA SPASIAL DAERAH	24
GAMBAR 9. WEBSITE DATAKU	25
GAMBAR 10. PEMBUKAAN MUSRENBANG DIY TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2015.....	30
GAMBAR 11. RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN	33
GAMBAR 12. RAKOR SIPD 2015	36
GAMBAR 13. PUBLIKASI DATA MELALUI WEB BAPPEDA DIY	37
GAMBAR 14. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	40

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
5. *Keuangan*
6. *Sistematika LKj IP*

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA DIY dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2015 antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA DIY;

2. Mendorong BAPPEDA DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA DIY untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAPPEDA DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

BAPPEDA DIY merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik dan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan;
3. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Kelautan dan Sub Bidang Dunia Usaha;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;

5. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan Energi Sumberdaya Mineral dan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Kinerja Program;
7. Bidang Perencanaan dan Statistik, yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Statistik;
8. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPTLTD); serta
9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

I.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA DIY mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
6. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3 Keadaan Pegawai

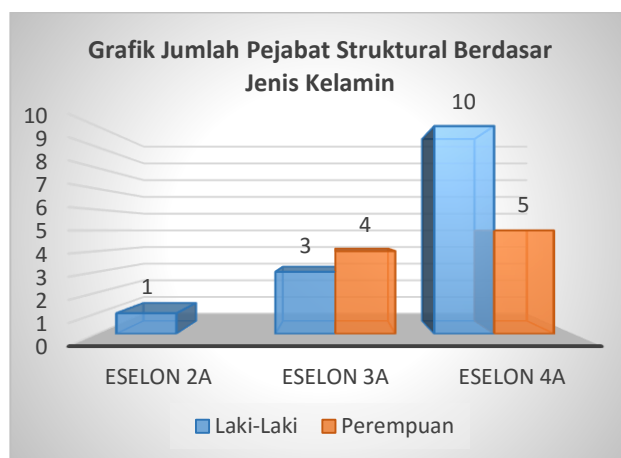
I.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di BAPPEDA DIY sampai dengan 31 Desember 2015, tercatat sebanyak 121 orang yang terdiri dari 23 orang pejabat struktural, 13 orang pejabat fungsional tertentu, dan 85 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut:

a) Pejabat struktural

Pejabat struktural di BAPPEDA DIY Eselon III terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA DIY. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA DIY dijelaskan pada Gambar 1. berikut:



Sumber : BAPPEDA DIY

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin

b) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Di samping pejabat struktural, berdasarkan analisis kebutuhan pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada instansi BAPPEDA DIY dibutuhkan 2 orang fungsional peneliti, 25 orang pejabat fungsional perencana serta 1 orang arsiparis. Kondisi saat ini baru tersedia 12 orang pejabat fungsional perencana dan 1 pejabat fungsional peneliti sehingga masih kekurangan 13 pejabat fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungsional peneliti serta 1 orang arsiparis. Formasi pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di BAPPEDA DIY dapat dilihat pada tabel Tabel I-1. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum BAPPEDA DIY Tahun 2015 berikut :

Tabel I-1. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum BAPPEDA DIY Tahun 2015

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pejabat Fungsional Peneliti	0	1	1 orang
Pejabat Fungsional Perencana	8	4	12 orang
Pejabat Fungsional Arsiparis	0	0	0 orang
Fungsional Umum	49	36	85 orang

Sumber : BAPPEDA DIY, 2016

I.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan

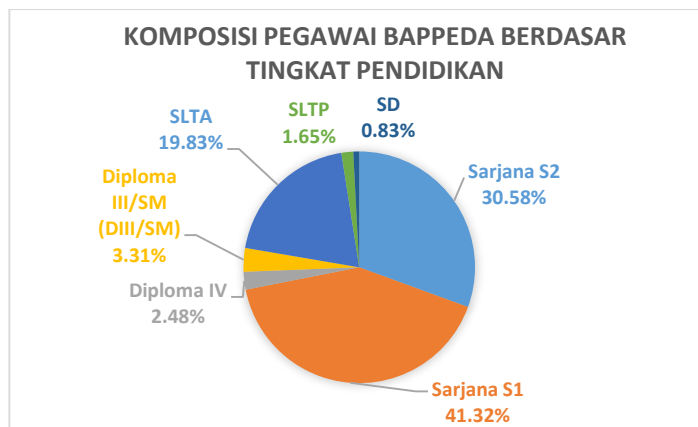
Jumlah pegawai BAPPEDA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2015 seperti dijelaskan pada tabel Tabel I-2. berikut :

Tabel I-2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S2	37
2.	Sarjana S1	50
3.	Diploma IV	3
4.	Diploma III/SM (DIII/SM)	4
5.	SLTA	24
6.	SLTP	2
7.	SD	1
	Total	121

Sumber : BAPPEDA DIY 2016

Jumlah pegawai BAPPEDA DIY per 31 Desember 2015 seperti dijelaskan pada Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas didistribusikan dalam struktur organisasi BAPPEDA DIY sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam grafik Gambar 2. berikut:



Sumber: BAPPEDA DIY, 2016

Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

Dari Gambar 2. diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BAPPEDA DIY sebagian besar diisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 (50 orang atau 41,32%), kemudian pegawai

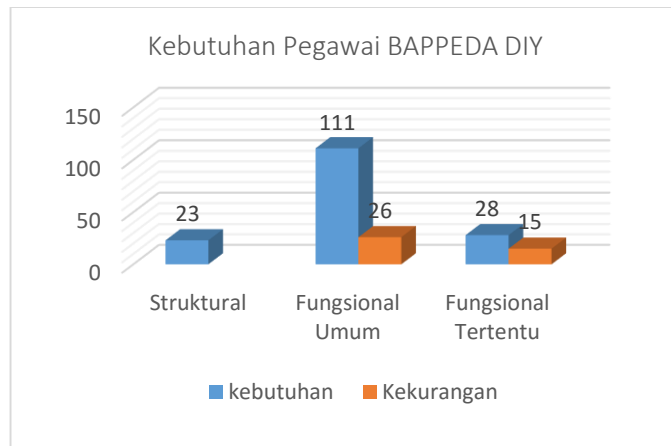
dengan pendidikan S2 (37 orang atau 30,58%), dan SLTA (24 orang atau 19,83%). Kondisi pegawai dengan persentase seperti tergambar dalam Gambar 2 diatas secara umum jika dilihat dari segi kuantitas masih kurang, namun dalam segi kualitas jumlah personil di BAPPEDA DIY sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

I.3.3 Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan pegawai sebanyak 23
Pada tahun 2015 jumlah jabatan sudah terisi terisi sebanyak 23.
2. Untuk jabatan fungsional umum BAPPEDA DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2012, kebutuhan pegawai untuk pejabat fungsional umum adalah sebanyak 111 orang. Pada saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 85 orang. Dengan demikian masih dibutuhkan personil sebanyak 26 orang untuk melengkapi formasi. Untuk mencukupi kebutuhan pegawai, tiap tahun BAPPEDA DIY mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap.
3. Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil BAPPEDA DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan ke- 2 atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2008 seharusnya memiliki 28 personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian 2 personil untuk jabatan fungsional peneliti, 25 personil untuk jabatan fungsional perencana, dan 1 orang fungsional arsiparis. Saat ini BAPPEDA DIY baru memiliki 1 orang yang menduduki jabatan fungsional peneliti, 12 orang pada jabatan fungsional perencana, dan belum memiliki pejabat fungsional arsiparis. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan

fungsiional perencana BAPPEDA DIY telah mengirimkan personil pada diklat yang dibutuhkan.



Sumber: BAPPEDA DIY 2016

Gambar 3. Grafik Kebutuhan Pegawai BAPPEDA DIY

I.4 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA DIY dapat dilihat pada Tabel I-3. berikut :

Tabel I-3. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2015

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Kendaraan roda 4	13 buah	Baik
Kendaraan roda 2	12 buah	Baik
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.669 buah	Baik
Alat Studio dan komunikasi	196 buah	Baik
Genset	1 buah	Baik
Buku Perpustakaan	3.093 buah	Baik

Sumber: BAPPEDA DIY, 2016

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA DIY. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA DIY.

I.5 Keuangan

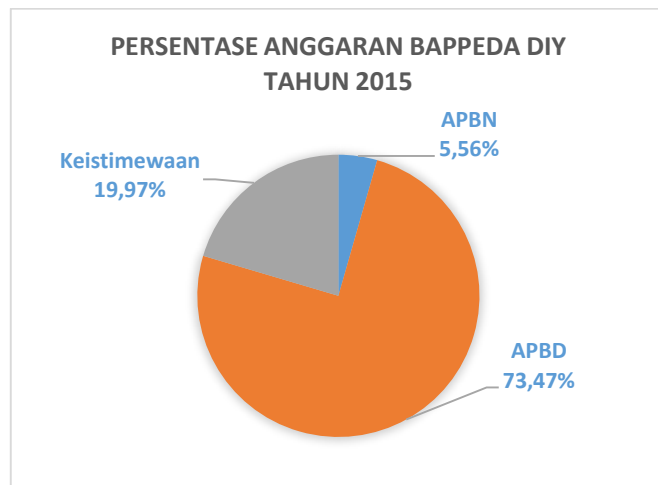
Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas BAPPEDA DIY sebagian besar berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didukung oleh anggaran dari dana Keistimewaan, serta APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh BAPPEDA DIY adalah seperti dijelaskan pada tabel Tabel I-4. sebagai berikut:

Tabel I-4. Anggaran belanja Langsung BAPPEDA DIY Tahun 2015

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase
APBN	1.390.491.000,00	6,56 %
APBD	15.580.442.600,00	73,47 %
Keistimewaan	4.235.406.710,00	19,97 %
Total	21.206.340.310,00	100%

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

Anggaran terbesar yang dikelola oleh BAPPEDA DIY berasal dari APBD yaitu sebesar 73,47% sedangkan dana yang berasal dari APBN sebesar 6,56% dan dana keistimewaan sebesar 19,97%. Proporsi dari anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. berikut :



Sumber : BAPPEDA DIY. 2016

Gambar 4. Persentase Anggaran BAPPEDA DIY Tahun 2015

Anggaran yang komposisinya seperti tergambar pada Gambar 4. Di atas digunakan untuk membiayai sejumlah 11 program dan 53 kegiatan reguler yang terdiri dari empat program pendukung perencanaan, dan tujuh program urusan perencanaan.

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BAPPEDA DIY tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya ;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/Manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2015*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2015*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama tiga tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan sampai tahun 2014 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 .

Perubahan Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017 merupakan konsekuensi adanya perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran BAPPEDA DIY. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra BAPPEDA DIY 2012-2017 seperti dijelaskan pada tabel Tabel II-1 berikut :

Tabel II-1. Perubahan Sasaran BAPPEDA DIY 2012-2017

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)							
		2013	2014	2015		2016		2017	
				Semula	Perubahan	Semula	Perubahan	Semula	Perubahan
1	2	3	4	5		6		7	
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	24,16	20,45	17,04					
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan				13,94		10,86		8,07
2	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	24,16	20,45						
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana			-	-	-	-	-	-
3	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	74	79	84					
	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD				84		89,14		91,93
4	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	94	96	97					
	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan				97		98		100
5	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60	70						
	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses			-	-	-	-	-	-
6	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	100					
	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD				100		100		100

Sumber : BAPPEDA DIY 2016

Perubahan renstra terkait perubahan sasaran strategis dan target-target yang akan dicapai didasari atas sebab-sebab sebagai berikut :

1. Dalam rentra BAPPEDA DIY 2012-2017 sebelum perubahan realisasi indikator kinerja sasaran dihitung secara terpisah yang dibagi dalam sektor-sektor yang mewakili perencanaan sektoral di BAPPEDA DIY. Penyederhanaan perhitungan diperlukan untuk memudahkan perhitungan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan realisasi indikator kinerja di BAPPEDA DIY. Dengan pertimbangan tersebut maka perhitungan realisasi kinerja tidak lagi dihitung terpisah karena setiap sektor secara keseluruhan memberikan kontribusi dalam keseluruhan realisasi kinerja BAPPEDA DIY;
2. Sasaran kinerja dalam urusan statistik yaitu Tersedianya data statistik yang akurat (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan memiliki indikator kinerja Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia kelengkapan data perencanaan dan persentase data yang bisa diakses. Kedua indikator kinerja bisa dikompositkan menjadi satu indikator kinerja untuk menghitung persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan.

II.1.1 Visi dan Misi

Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY yaitu sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik yang tertuang didalam RPJMD 2012 -2017. Visi yang dituangkan dalam Renstra BAPPEDA DIY 2012-2017 adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi di atas adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi

permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target – target pembangunan yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA DIY 2012-2017 di atas. maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi BAPPEDA DIY dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Misi 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi 2. Di dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Misi 3. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik dengan memastikan data tersebut *valid/akurat up to date* aktual tersedia dan mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel II-2. berikut :

Tabel II-2. Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi

NO	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
2.	Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
3.	Meningkatkan kualitas manajemen data	Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan serta meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada Tabel II-3 berikut :

Tabel II-3. Sasaran Kinerja BAPPEDA DIY 2012-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Akhir 2017
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	28,19	8,07
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	0,00	91,93
3.	Tersedianya data statistik yang akurat (<i>up to date, valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	0,00	100

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

II.1.3 Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

II.1.3.1 Strategi dan Kebijakan Misi 1

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi pertama strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi ini adalah dengan pengarusutamaan sistem informasi perencanaan terpadu.

II.1.3.2 Strategi dan Kebijakan Misi 2

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi kedua strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif ;
2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi kedua adalah dengan meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu program kegiatan.

II.1.3.3 Strategi dan Kebijakan Misi 3

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi ketiga strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan;
2. Memperkuat sistem informasi data terpadu.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah membangun sistem satu data pembangunan.

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BAPPEDA DIY merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel II-4 berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2015:

Tabel II-4. Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan (TW)	
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	13,94	I	-
					II	-
					III	-
					IV	13,94
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	84	I	-
					II	-
					III	-
					IV	84
3.	Tersedianya data statistik yang akurat (<i>up to date</i> , <i>valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	97	I	4,8
					II	38,8
					III	72,7
					IV	97

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015

Pelaksanaan program kegiatan BAPPEDA DIY pada tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 22.146.842.615,00 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.566.400.015,00 (enam miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu lima belas rupiah) dan Belanja Langsung Rp 15.580.442.600 ,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Realisasi pelaksanaan anggaran APBD yang dikelola sebesar Rp 20.621.392.256,00 (93,12%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 6.415.291.535,00 (31,11%) dan belanja langsung sebesar Rp 14.206.100.721,00 (68,89%).

II.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA DIY menetapkan target belanja sebesar Rp 22.146.842.615,00 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus

empat puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar RP 6.566.400.015,00 (enam miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu lima belas rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 15.580.442.600 ,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Tabel II-5. Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2015

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 6.566.400.015,00	29,65%
Belanja Langsung	Rp 15.580.442.600,00	70,35%
Jumlah	Rp 22.146.842.615,00	100%

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2015 BAPPEDA DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II-6. Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA DIY Tahun 2015

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Rp 8.700.436.900,00	55,84 %
2	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Rp 2.010.844.550,00	12,91 %
3	Tersedianya data statistik yang akuntabel (<i>up to date, valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.	Rp 1.193.335.000,00	7,66 %
4	Program Pendukung	Rp 3.675.826.150,00	23,59 %
	Jumlah	Rp15.580.442.600,00	100%

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

II.4 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. BAPPEDA DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA DIY baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

II.4.1 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan)

Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS;



Gambar 5. Website Jogja Plan

II.4.2 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)

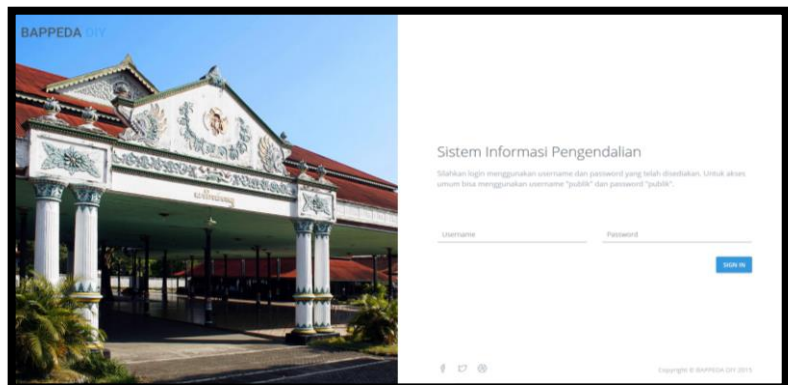
Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR), SIPR berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota;



Gambar 6. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang

II.4.3 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

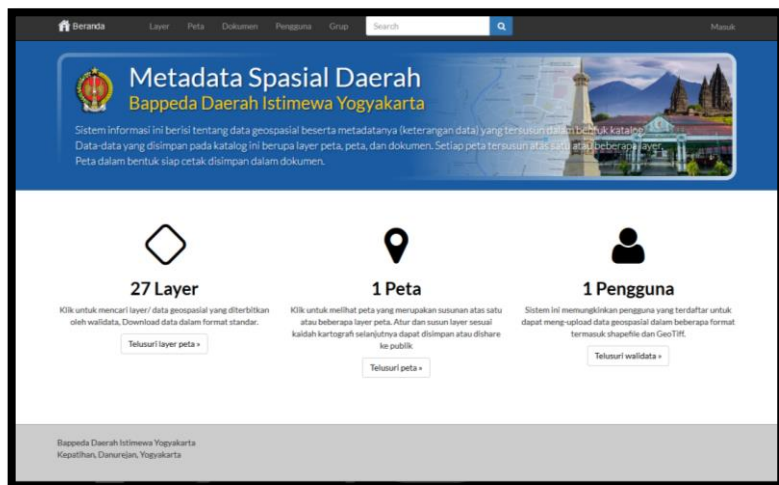
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 7. Website Monev

II.4.4 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)

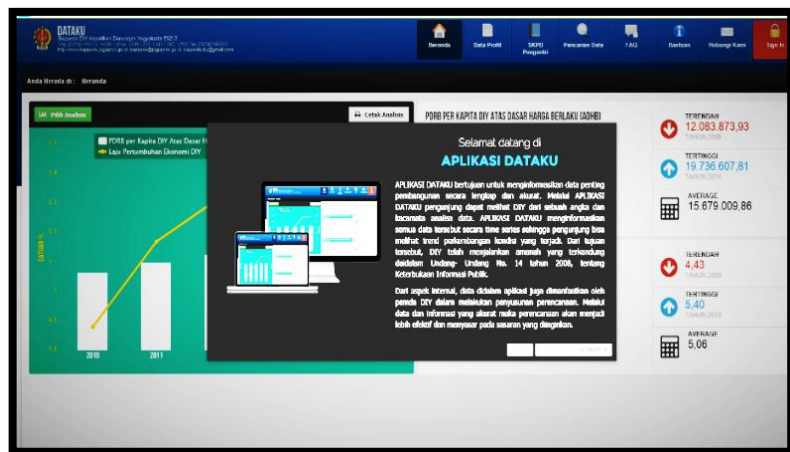
Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD), Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;



Gambar 8. Website Meta Data Spasial Daerah

II.4.5 Sistem Aplikasi Dataku

Sistem Aplikasi Dataku dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan data perencanaan yang harus disediakan.



Gambar 9. Website Dataku

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2015*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

BAPPEDA DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3-1. berikut:

Tabel III-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis BAPPEDA DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam Tabel III-2. sebagai berikut:

Tabel III-2. Capaian Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	13,94	8,28	140,60	Sangat Baik
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	84	86,57	103,06	Sangat Baik
3.	Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	97	97,07	100,07	Sangat Baik

Sumber : BAPPEDA DIY. 2016

Dari tabel Tabel III-2. di atas terdapat tiga sasaran strategis yang masing-masing memiliki satu indikator kinerja. Pada Tahun 2015 ketiga realisasi indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah mencapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Strategis

Pada tahun 2015 3 (tiga) sasaran strategis BAPPEDA DIY yang dicerminkan dalam capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja telah mencapai target

yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Secara rinci capaian indikator kinerja BAPPEDA DIY menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatkan

Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatkan diukur menggunakan indikator kinerja Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Rumusan indikator kinerja yang digunakan adalah persentase antara target indikator yang tidak tercapai pada tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah indikator pada kurun waktu pembangunan yang telah ditetapkan. Semakin kecil angka persentase selisih realisasi sasaran maka akan semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Tahun 2015 sesuai dengan renstra BAPPEDA DIY 2012-2017 perubahan maka dilakukan penyesuaian perhitungan realisasi indikator kinerja. Pada tahun 2015 digunakan indikator kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan, hal tersebut berbeda dengan tahun 2014 yang menggunakan indikator program sebagai ukuran realisasi indikator kinerja. Perubahan dilakukan sesuai dalam renstra BAPPEDA DIY 2012-2017 dalam rangka penyederhanaan perhitungan, tidak ada perubahan secara substantif antara indikator program dengan indikator sasaran karena setiap sasaran pasti didukung satu atau beberapa program.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target indikator kinerja RPJMD tahun (N) yang tidak tercapai}}{\text{Total jumlah indikator RPJMD tahun 2012 – 2017}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung capaian kinerja (% realiasi) karena target yang akan dicapai adalah penurunan kesenjangan maka formula untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\frac{(target - (realisasi - target))}{target} \times 100\%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat dapat dilihat pada tabel Tabel III-3. berikut:

Tabel III-3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1
Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkat

No.	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	16,90	13,94	8,28	140,60	8,07	97,39

Sumber : BAPPEDA DIY. 2016

Tabel III-3. diatas menunjukkan Realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan sebesar 8,28%, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 13,94% kesenjangan dimaksud dapat diturunkan sebesar 5,66% dari target menjadi 8,28%. Dari 157 indikator kinerja sasaran sebanyak 13 sasaran kinerja tahunan yang belum mencapai target kinerja sasarnya. Capaian kinerja sasaran ke-1 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 140,60 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan kondisi pada pada akhir RPJMD tahun 2017 adalah sebesar 97,39%.

Realisasi kinerja sasaran ke-1 tahun 2015 sebesar 8,28% didukung oleh kinerja Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan, dan Bidang sarana Prasarana. Ketercapaian ini menunjukkan upaya perencanaan yang dilakukan dengan

koordinasi lintas sektoral maupun kewenangan dalam mendukung capaian sasaran yang ditentukan sudah berjalan efektif.

Realisasi kinerja tahun 2015 sasaran ke-1 dibandingkan dengan target realisasi menunjukkan penurunan kesenjangan sebesar 5,66%. Jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.55%, dan tahun 2013 sebesar 1,34% selalu mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 ini tidak terlepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah DIY;
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak. terutama antara pihak eksekutif dengan legislative, untuk menjaga kesesuaian dokumen perencanaan daerah mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen DPA;
3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dalam hal ini Jogja Plan yang optimal.



Gambar 10. Pembukaan Musrenbang DIY Tahun 2014 Dalam Rangka Penyusunan RKPD 2015

Untuk meningkatkan akselerasi agar target capaian indikator dapat terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang

diamanahkan dalam dokumen RPJMD DIY dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi kooordinasi dan evaluasi pelaksanaan program di sektor-sektor terkait.
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencanaan dengan institusi penganggaran dan mengintegrasikan proses politik sejak awal serta menyinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan maupun penganggaran.
3. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam proses perencanaan yang efektif.
4. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang tatacara koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah.

III.2.2 Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dengan Rencana Yang Telah Disusun Sebelumnya

Sasaran konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya diukur menggunakan indikator kinerja Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. IKU Gubernur sebagai representasi sasaran RPJMD digunakan sebagai indikator sasaran.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Indikator Sasaran tahun 'N' terhadap capaian akhir RPJMD}}{\text{Jumlah indikator sasaran}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2 dapat dilihat pada Tabel III-4. berikut:

Tabel III-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2 Konsistensi antara Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dengan Rencana yang Telah Disusun Sebelumnya

No.	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	81,12	84	86,57	103,06	91,93	94,17

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD tahun 2015 sebesar 86,57% sedangkan target yang akan dicapai sebesar 84% menunjukkan realisasi target kinerja sasaran ke-2 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2015 sebesar 103,06% sedangkan terhadap target akhir RPJMD 2017 capaiannya sebesar 94,17%.

Ketercapaian sasaran tahunan tersebut menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda DIY sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100% dapat dicapai karena pada tahun 2015 ini telah disumbang pencapaian sebesar 86,57%. Pencapaian tersebut tidak dapat dipisahkan oleh capaian 17 Indikator Kinerja Utama Gubernur di mana sebanyak 10

indikator memenuhi/melebihi target dan 7 indikator tidak memenuhi target.

Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda DIY sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

Guna meminimalisir hambatan-hambatan dalam pencapaian sasaran ke-2 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan *affirmative* terhadap capaian indikator yang belum memenuhi target melalui penguatan program/kegiatan pendukung.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.



Gambar 11. Rapat Koordinasi Pengendalian

III.2.3 Tersedianya data statistik yang akuntabel (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan

Sasaran Tersedianya data statistik yang akuntabel (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung

perencanaan diukur menggunakan indikator kinerja Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan. Formulasi Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Data yang terisi}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$$

Tabel III-5. Tersedianya data statistik yang akurat (*up to date*, *valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan

No.	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	96,04	97	97,07	100,07	100	97,07

Sumber : BAPPEDA DIY. 2016

Ketersediaan data yang aktual dan valid, sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan kegiatan penyediaan data statistik sesuai Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007. Dengan adanya kewenangan dan tugas fungsi BPS tersebut, maka BAPPEDA DIY menjalin kerjasama dengan pihak BPS DIY dalam penyediaan data pembangunan yang tertuang dalam naskah kerjasama nomor : $\frac{027/01238}{34500.083.1}$ pada tanggal 7 Februari 2014 guna penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Statistik memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan

kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2010, salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah DIY adalah penyelenggaraan statistic daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir. Tersedianya data yang benar dan akurat merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Guna memperoleh data statistik yang benar, akurat dan sesuai kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan stakeholders penyedia data lainnya. Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai untuk menjadi sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang terpercaya.

Dari Tabel Tabel III-5. di atas dapat dilihat realisasi capaian kinerja dari sasaran Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2015 telah mencapai target. Target ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan adalah sebesar 97%, sedangkan capaiannya adalah 97,07% atau sebesar 100,07% dari target. Jika dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD 2012-2017 (tahun 2017) maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 97,07% atau kurang 2,93% dari target yang diamanahkan pada akhir tahun RPMD 2012-2017;

Capaian pada tahun 2015 ini juga menunjukkan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2013. Pada tahun 2014 dari target yang diamanatkan sebesar 96% dapat direalisasikan sebesar 96,04% sedangkan pada tahun 2013 dari target 94% dapat direalisasikan sebesar 92,34%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data. dalam hal ini Badan Pusat Statistik.
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara kabupaten/kota dengan instansi SKPD di Pemerintah Daerah DIY dalam satu kesatuan sistem. baik melalui Sistem Informasi DATAKU yang disediakan melalui website BAPPEDA DIY maupun melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).



Gambar 12. Rakor SIPD 2015

Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-3 yang selama ini masih dirasakan adalah:

1. Ketersediaan data perencanaan pembangunan dari BPS waktunya kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Integrasi data kabupaten/kota dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di kabupaten/kota.

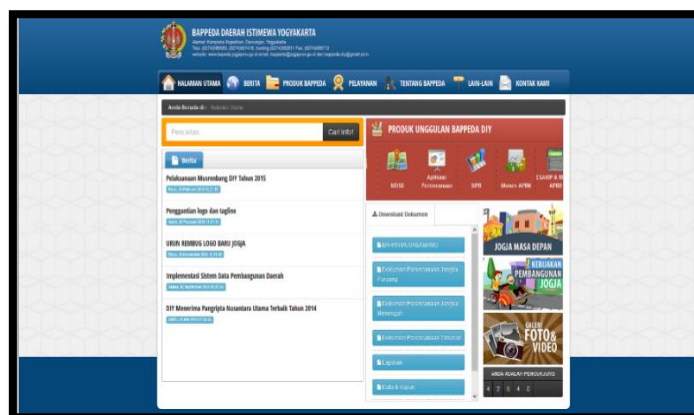
Ketersediaan data yang akurat dan valid merupakan kebutuhan mutlak dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Semakin cepat ketercapaian target pada akhir

RPJMD 2012-2017 akan semakin baik. Untuk mendukung akselerasi guna pencapaian target ketersediaan data yang akurat dan valid sebesar 100%. telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS DIY selaku lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data dasar;
2. Meningkatkan peran kabupaten/kota dan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi data;
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan teknologi informasi sebagai dukungan dalam proses penyediaan data lintas daerah maupun instansi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di samping faktor pendukung terdapat pula faktor yang menghambat dalam proses pencapaian sasaran ke-3 ini yaitu data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.

Sebagai upaya meminimalisir faktor penghambat. telah dilakukan peningkatan koordinasi dan manajemen data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan yang efektif.



Gambar 13. Publikasi Data Melalui Web BAPPEDA DIY

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA DIY tahun 2015 adalah sebesar Rp 20.621.392.256,00 (93,11%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 6.416.291.535,00 (31,11% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 14.206.100.721,00 (68,89% dari total realisasi).

Ralisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 11.086.427.124,00 (93,13% dari total anggaran yang dilokasikan untuk proram utama sebesar Rp 11.904.616.450,00) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 3.119.673.597,00 (84,87% total anggaran yang dilokasikan untuk proram pendukung sebesar Rp 3.675.826.150,00), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 6.415.291.353,00 (97,70% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel Tabel III-6. berikut:

Tabel III-6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target Rp	Realisasi Rp	% Realisasi
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	13,94	8,28	140,60	8.700.436.900,-	7.933.858.278,-	91,19
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	84	86,57	103,06	2.010.844.550,-	1.978.553.951,-	98,39
3.	Tersedianya data statistik yang akuntabel (<i>up to date, valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan	97	97,07	100,07	1.193.335.000,-	1.174.014.895,-	98,38
Jumlah					11.904.616.450,-	11.086.427.124,-	93,13
Belanja langsung Pendukung					3.675.826.150,-	3.119.673.597,-	84,87
Belanja Tidak Langsung					6.566.400.015,-	6.415.291.535,-	97,70
Total Belanja					22.146.842.615,-	20.621.392.256,-	93,11

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

Tabel III-7. Tingkat Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

No	sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	140,60	91,19	8,81%
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	103,06	98,39	1,61
3.	Tersedianya data statistik yang akuntabel (<i>up to date, valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	100,07	98,38	1,62

Sumber: BAPPEDA DIY. 2016

III.4 Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja 2014

III.4.1 Evaluasi Kinerja 2014

Hasil evaluasi dari Inspektorat DIY terhadap Laporan Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2013 memperoleh nilai sebesar 74,79 dengan interpretasi predikat B (Baik), tahun 2014 memperoleh nilai 76,32 dengan interpretasi predikat A (sangat baik). Sehubungan adanya trend kenaikan nilai maka pada tahun 2015 direkomendasikan kepada Kepala BAPPEDA DIY hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja yang telah baik;
2. Terus meningkatkan kinerja yang masih dapat diperbaiki.

III.4.2 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat BAPPEDA DIY telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengelola anggaran dalam usaha pencapaian target- target yang ditetapkan baik yang merupakan target fisik maupun keuangan;
2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola BAPPEDA DIY.



Gambar 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA DIY pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun ke-3 dari Rencana strategis BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA DIY tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

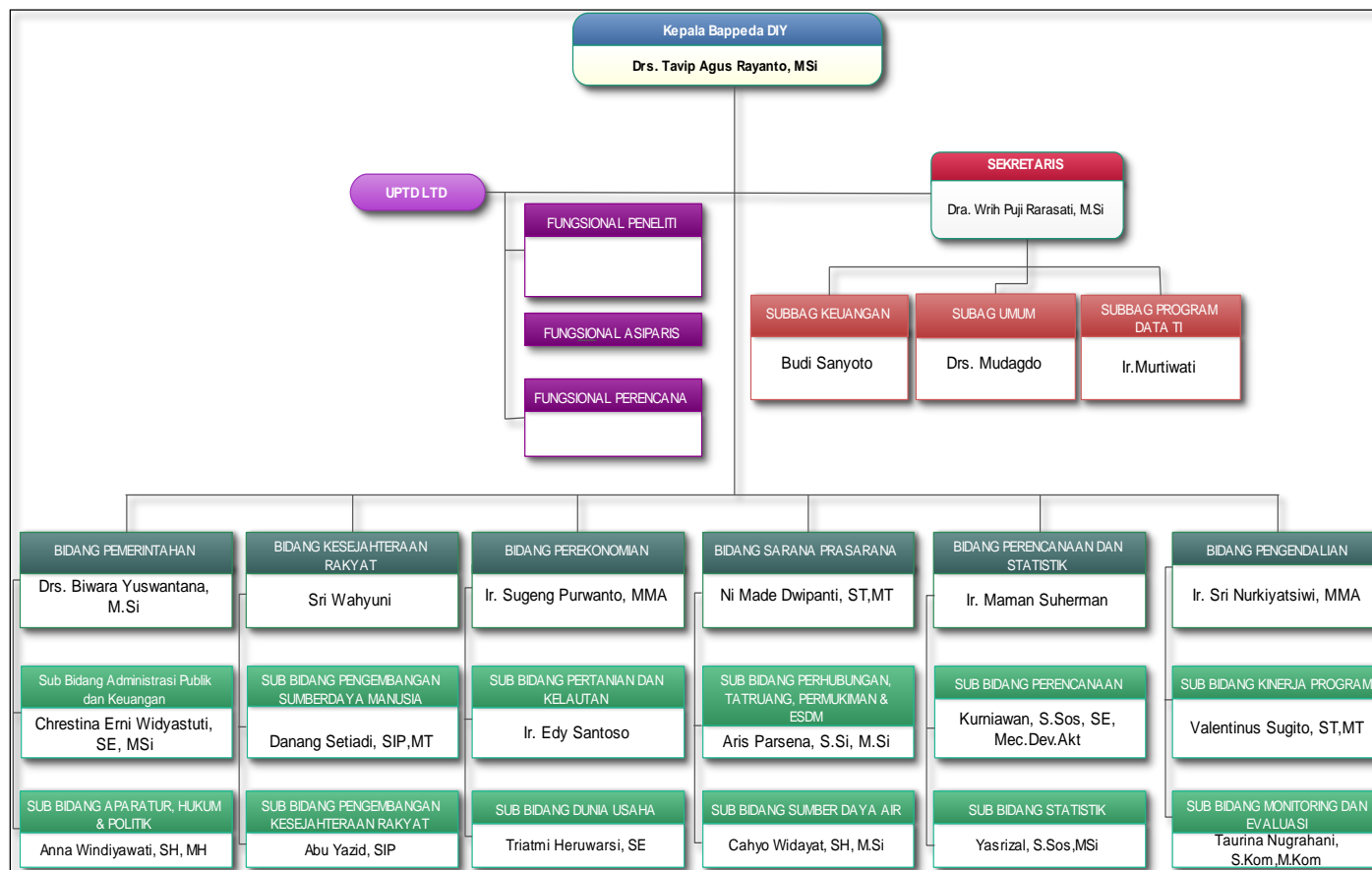
1. Dari analisis terhadap tiga (3) sasaran kinerja yang masing-masing memiliki satu indikator semuanya telah memenuhi target yang ditetapkan atau capainnya lebih dari 100%.
2. Keberhasilan capain indikator kinerja lebih dari 100% bukan berarti tanpa hambatan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
 - i. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
 - ii. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di BAPPEDA DIY terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Laporan Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lampiran

1. Lampiran 1 : Struktur Organisasi BAPPEDA DIY;
2. Lampiran 2 : Perencanaan Strategis BAPPEDA DIY 2012-2017;
3. Lampiran 3 : Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2015 Tingkat Provinsi Kategori A;
4. Lampiran 4 : Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP Tahun 2014;
5. Lampiran 5 : Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya;
6. Lampiran 6 : Penghargaan dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015. Predikat "A" (Sangat Baik);
7. Lampiran 7 : Penghargaan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik (Aplikasi Perencanaan);
8. Lampiran 8 : Piagam Penghargaan Pencapaian MDG's Tertinggi
9. Lampiran 9 : Piagam Penghargaan Pencapaian MDG's Pengentasan Kemiskinan Terbaik 2012-2014;
10. Lampiran 10: Perjanjian Kinerja.

Lampiran 1: Struktur Organisasi BAPPEDA DIY :



Lampiran 2: Perencanaan Strategis BAPPEDA DIY 2012-2017 :

Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif Tiap Program Prioritas Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.707.608	100%	1.707.608	100%	1.878.369					100%	5.293.585
Perubahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								100%	1.795.000	100%	1.974.500	100%	9.063.085
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	3.120.400	100%	3.120.400	100%	2.682.440						8.923.239
Perubahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								100%	2.950.684	100%	3.245.752	100%	15.119.676
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	93.115	100%	150.000	100%	370.000					100%	613.115

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
Perubahan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Manajemen Program, SDM Aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								100%	444.000	100%	532.800	100%	789.265
4.	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	161.325	100%	161.325	100%	525.670					100%	848.320
Perubahan	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								100%	630.770	100%	756.870	100%	1.913.633
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	28,19%	24,16%	1.193.915	20,45%	2.190.000							20,45%	3.383.913
Perubahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan						13,94	2.016.358	9,38	2.718.000	6,97	3.261.600	6,97	7.995.958

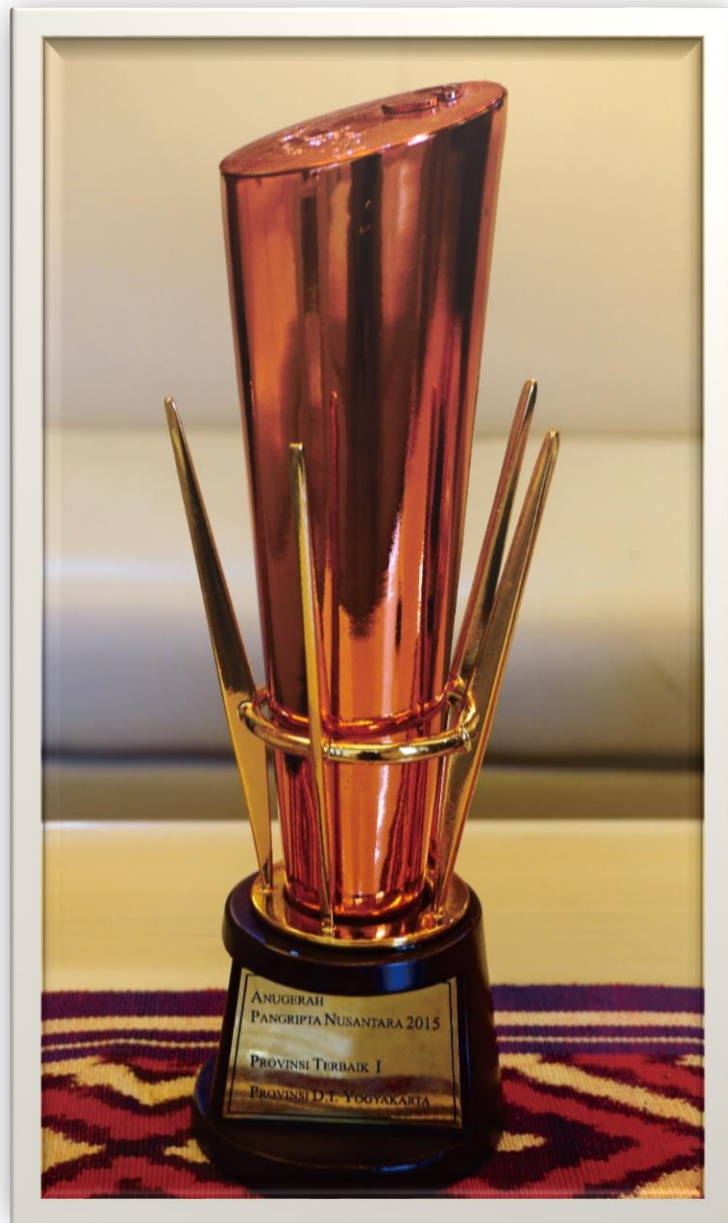
No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
6.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan	1,34%	1,15%	1.206.240	0,97%	1.010.000	0,81%	1.722.183					0,97%	2.216.240
Perubahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan (RPJMD)								3,52	2.316.000	2,62	3.261.600	2,62	5.577.600
7.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian	6,71%	5,75%	848.749	4,87%	935.000	4,06%	1.836.444					4,06%	3.620.193
Perubahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan								1,47	1.428.000	1,09	1.713.600	1,09	3.141.600
8.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya	17,45%	14,96%	1.181.841	12,66%	1.365.000	10,55%	1.296.120					10,55%	3.842.961
Perubahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD)								4,11%	1.818.000	3,05%	2.181.600	3,05%	3.999.600

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
9.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana	2,68%	2,30%	1.389.811	1,95%	1.385.000	1,62%	1.761.539					1,62%	4.536.350
Perubahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana (RPJMD)								1,76%	2.358.000	1,31%	2.829.600	1,31%	5.187.600
10.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD	0%	74%	1.439.699	79%	1.655.000	84%	2.180.000					84%	5.274.699
Perubahan	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan								77%	2.616.000	79,41%	3.139.200	79,41%	5.755.200
11.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Dapat Diakses	50%	60%	905.080	70%	570.000							70%	1.475.080
12.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia	92%	94%	1.425.000	96%	1.475.000	97%	1.525.000					97%	4.425.000

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
Perubahan	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan								98%	1.830.000	100%	2.196.000	100%	4.026.000

Sumber : RPJMD DIY. Tahun 2012-2017

**Lampiran 3 : Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2015 Tingkat
Provinsi Kategori A :**



Lampiran 4 : Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP Tahun 2014 :



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT**

Jalan Cendana No. 40 Yogyakarta, Telepon 512567, 562009 Faksimile (0274)512567
E-mail: inspektorat@jogjapro.go.id
YOGYAKARTA 55166

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Kepada

Yth. Kepala B A P P E D A

Nomor : 700 / 1165 / Sekret

Lampiran :

Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal : Laporan Hasil Evaluasi

di_

Sistem AKIP Tahun

YOGYAKARTA

Anggaran 2014

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2014 mendasar pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 279/V/INSP/2015 tanggal 5 Mei 2015.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi Sistem AKIP pada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi Sistem AKIP pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*)/AKU;
 - 3) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 76,32 dengan interpretasi predikat A (Sangat baik);
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,58 atau 78,81% dari bobot sebesar 35,00;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 16,29 atau 65.15% dari bobot sebesar 20,00;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,25 atau 75.00% dari bobot sebesar 15,00;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,29 atau 72.92% dari bobot sebesar 10,00;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,91 atau 69.53% dari bobot sebesar 20,00.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi Sistem AKIP Tahun 2013, yaitu terkait penyajian informasi kinerja, telah dilakukan perbaikan;
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi Sistem AKIP Tahun 2014 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang telah baik dan terus meningkatkan kinerja yang masih dapat diperbaiki.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP pada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUMADI, SH, MH
NIP. 19630826 198903 1 007

Lampiran 5 : Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya :



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon (0274) 562811 (Psw 1209-1220, 1243-1247, 1253), 589583 Fax. (0274) 586712
website <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>, e-mail : bappeda@bappeda.jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA
KodePos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN 2014

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Kepala BAPPEDA DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang telah baik dan terus meningkatkan kinerja yang masih dapat diperbaiki	<ol style="list-style-type: none">1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengelola anggaran dalam usaha pencapaian target- target yang ditetapkan baik yang merupakan target fisik maupun keuangan;2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola BAPPED DIY.

Yogyakarta, Januari 2015

KEPALA



TAXIR AGUS RAYANTO

NIP. 19641107 199103 1 004

Lampiran 6 : Penghargaan dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015. Predikat “A” (Sangat Baik) :



Lampiran 7 : Penghargaan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik (Aplikasi Perencanaan) :



Lampiran 8: Piagam Penghargaan Pencapaian MDG's Tertinggi :



Lampiran 9 : Piagam Penghargaan Pencapaian MDG's Pengentasan Kemiskinan Terbaik 2012-2014 :



Lampiran 10: Perjanjian Kinerja :

2



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**
Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon (0274) 562811 (Psw 209-220, 243-247, 253), 589583 Fax. (0274) 586712
website <http://www.bappeda.pemda-diy.go.id> e-mail: bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id
YOGYAKARTA
Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 10 Maret 2015

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta



HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah DIY



Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si
NIP. 19641107 199103 1 004

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	13,94	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	13,94
2.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	84	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84
3.	Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	97	Triwulan I	4,8
					Triwulan II	38,8
					Triwulan III	72,7
					Triwulan IV	97

Jumlah Anggaran

	: Rp.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 1.662.796.200,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp. 1.432.415.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	: Rp. 370.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 522.010.950,-
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp. 2.016.358.000,-
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	: Rp. 1.836.443.400,-
7. Program Perencanaan Sosial Budaya	: Rp. 1.296.119.700,-
8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	: Rp. 1.761.538.600,-
9. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	: Rp. 1.722.183.600,-
10. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	: Rp. 1.979.273.050,-
11. Program Pengembangan Statistik Daerah	: Rp. 1.448.762.500,-
12. Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	: Rp. 2.931.591.000,-

Keterangan

Anggaran APBD : Rp. 18.999.492.000,-
Anggaran Dekonsentrasi : Rp. 1.190.491.000,-

Yogyakarta, 10 Maret 2015

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta



HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY



Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si
NIP. 19641107 199103 1 0047